



KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TAHUN 1999

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memnuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sastra.

SKRIPSI

Disusun oleh:

**KARTIKA HIJRIANI
040110301096**

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	8
1.4 Kerangka Teori	8
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II INDONESIA MENGANEKSASI TIMOR TIMUR.....	13
2.1 Awal Kedatangan Portugis Hingga Terjadinya Revolusi Bunga ...	13
2.2 Aneksasi Timor Timur	36
2.3 Pembangunan di Timor Timur Pasca Aneksasi.....	48
BAB III PERJUANGAN MENUJU KEMERDEKAAN	
TIMOR LESTE	63
3.1 Insiden Santa Cruz (12 November 1991).....	63
3.2 Perubahan Politik di Indonesia	78
3.3 Jajak Pendapat dibawah Naungan PBB	87
3.4 Timor Leste Merdeka.....	107

BAB IV KESIMPULAN.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	141
LAMPIRAN	144

DAFTAR SINGKATAN

ABLAI	: Aku Berjuang Lestarikan Amanat Integrasi
ADITLA	: <i>Associacao Democratica Integracao Timor Leste na Australia</i> atau Perkumpulan Demokratis Integrasi Timor Ke dalam Australia
AHI	: Aku Mengembangkan Integrasi
Apodeti	: <i>Associacao Populer Democratica de Timor</i> atau disebut juga Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor
ASDT	: <i>Amiciacao Social Democratica Timorenses</i> atau Perkumpulan Demokrasi Sosial Timor
BAKIN	: Badan Koordinasi Intelijen
BRTT	: Barisan Rakyat Timor Timur
BMP	: Besi Merah Putih
CNRM	: <i>Conselho Nacional da Resistencia Maubere</i> atau Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Maubere
CNRT	: <i>Conselho Nacional da Resistencia Timorenses</i> atau Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor
DGS	: <i>Direcção Geral de Segurança</i> atau Direktorat Jendral Keamanan
DKM	: Dewan Kehormatan Militer
ETTA	: <i>East Timor Transitional Administration</i> atau Pemerintahan Transisi Timor Timur
Falintil	: <i>Forças Armadas Libertacao Nacional de Timor Leste</i> atau Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional Timor-Leste.
Fretilin	: <i>Front Revolucionaria de Timor Leste</i> atau Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Leste

IFET	: <i>International Federation for East Timor</i> atau Federasi Internasional di Timor Timur
IMF	: <i>International Monetary Fund</i> atau Dana Keuangan Internasional
Interfet	: <i>International Force for East Timor</i> atau Pasukan Internasional untuk Timor Timur
KPN	: Komisi Penyelidikan Nasional
KOTA	: <i>Klibur Oan Timur Aswain</i> atau Perkumpulan Ksatria Timor
KPS	: Komisi Perdamaian dan Stabilitas
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mahidi	: Mati Hidup dengan Indonesia
MFA	: <i>Movimento das Forças Armadas</i> atau Gerakan angkatan bersenjata
Opsus	: Operasi khusus
Pamswakarsa	: Pasukan Pengamanan Swakarsa
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PIDE	: <i>Polícia Internacional e de Defesa do Estado</i> atau Polisi Internasional untuk Pertahanan negara
SAPT	: <i>Sociedade Agricola Patria e Trabalho</i> yang secara harafiah berarti Masyarakat, Pertanian, Tanah Air, dan Kerja
Satgas P3TT	: Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur
STT	: Suara Timor Timur
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UDT	: <i>Uniao Democratica Timorenses</i> atau disebut juga Persatuan Demokratik Rakyat Timor

- UNAMET** : *United Nations Mission in East Timor* atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur
- UNHCR** : *United Nations High Commission on Refugees* atau Komisi Tinggi PBB urusan pengungsi
- UNIF** : *United Front for East Timor Autonomy* atau Front Bersama untuk Otonomi Timor Timur
- Untaet** : *United Nations Transitional Administration East Timor* atau Pemerintah Peralihan PBB di Timor Timur
- YLBH** : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perluasan Lembaga pendidikan di Timor Timur 1967-1973.....	20
Tabel 2.2 Jumlah sekolah di Timor Timur pada tahun 1976-1984.....	44
Tabel 2.3 Jumlah Murid di Timor Timur pada tahun 1976-1984.....	44
Tabel 2.4 Jumlah Guru di Timor Timur pada tahun 1976-1984.....	54
Tabel 3.1 Peta Kekuatan Pro-Otonomi dan Pro-kemerdekaan.....	73
Tabel 3.2 Pemerintahan Transisi Timor Leste.....	108
Tabel 3.3 Embrio Republik Timor Leste	109
Tabel 3.4 Konsep Pembangunan Timor Leste.....	111

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Republik Demokratik Timor Leste	124
2. Foto-foto	125
3. Kronologi lahirnya negara Timor Leste.....	128
4. Lagu Kebangsaan Timor Leste.....	139
5. Surat Pernyataan dan Hasil Wawancara	152
5.1 Surat Pernyataan	152
5.2 Hasil Wawancara dengan Heri.....	153
5.3 Hasil Wawancara dengan Ana Victoria.....	154
5.4 Hasil Wawancara dengan Holal.....	155
5.5 Hasil Wawancara dengan Paulino Dos Santos.....	156
5.6 Hasil Wawancara dengan Kuspriadi.....	157
5.7 Hasil Wawancara dengan Rosalina de Almeida	158
5.8 Hasil Wawancara dengan Dwi Nugroho B.	159
5.9 Hasil Wawancara dengan Filipe da Costa Meneses	161
6. Tabel profil milisi Pro-integrasi	162

RINGKASAN

Indonesia menganeksasi Timor Timur pada 1975-1976 melalui operasi militer dengan kode sandi Operasi Seroja dan menetapkannya sebagai propinsi ke-27. Hal ini dikecam oleh Dewan Keamanan PBB yang menyerukan agar Indonesia segera meninggalkan Timor Timur. Dewan Keamanan PBB juga menyerukan agar masyarakat Timor Timur diberi kesempatan untuk melakukan penentuan pendapat. Namun hal ini tidak digubris oleh pemerintah Indonesia. Operasi militer terus dilancarkan oleh militer Indonesia di daerah-daerah pedalaman Timor Timur, guna mematahkan perlawanan gerilya yang dilakukan oleh Fretilin. Operasi militer ini selain menimbulkan korban jiwa sekitar 60.000 orang juga menimbulkan kerusakan lahan pertanian masyarakat Timor Timur. Akibatnya rakyat tidak dapat menggarap ladang mereka sehingga menimbulkan krisis pangan di Timor Timur. Tak hanya operasi militer, pihak Indonesia juga melakukan eksploitasi terhadap perkebunan-perkebunan di Timor Timur seperti kopi dan kayu cendana, khususnya oleh keluarga serta kerabat dekat Presiden Soeharto. Sehingga penghasilan terbesar tentunya diterima oleh mereka. Sementara warga hanya menjadi pekerja perkebunan dengan penghasilan yang sangat minim. Setelah kehilangan sanak saudara akibat berbagai operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia dalam upaya untuk mematahkan perlawanan Fretilin, mereka harus kembali dirugikan dalam berbagai eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Timor Timur. Akibatnya semakin banyak masyarakat Timor Timur yang mendukung perjuangan Fretilin untuk memerdekakan Timor Leste, agar mereka dapat mengelola perkebunan mereka sendiri. Menanggapi kondisi politik yang terus memanas, PBB kembali menyerukan agar Indonesia memberi kesempatan pada masyarakat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.

Operasi militer Indonesia tidak mampu menggoyahkan perjuangan Fretilin untuk memperoleh kemerdekaan Timor Leste. Mereka berupaya untuk menyerang pertahanan-pertahanan militer Indonesia. Selain itu, mereka juga

mengirimkan utusannya, Jose Ramos Horta untuk melakukan perjuangan diplomasi ke berbagai negara guna mencari dukungan atas perjuangan Fretilin di Timor Timur. Kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional. Pada 10 Desember 1996, Jose Ramos Horta dan Uskup Belo, pemimpin Gereja Katolik di Timor Timur menerima penghargaan Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia. Perwakilan Indonesia bisa menerima jika penghargaan tersebut diberikan kepada Uskup Belo yang telah banyak berperan dalam upaya perdamaian di Timor Timur. Namun tidak demikian dengan Jose Ramos Horta yang dalam pandangan Indonesia lebih banyak menjadi penyulut timbulnya kekerasan pemuda Timor Timur sehingga perwakilan Indonesia di Norwegia menolak menghadiri acara tersebut. Anugerah Nobel Perdamaian ini memberikan semangat baru kepada Fretilin untuk terus berjuang melawan pendudukan Indonesia di Timor Timur.

Pada 9 Juni 1998, Presiden Habibie mengumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan “status khusus” kepada Timor Timur, suatu bentuk otonomi. Namun hal ini tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat Pro-kemerdekaan. Karena hal ini hanya akan memperpanjang masa pendudukan Indonesia di Timor Timur. Oleh karena itu, pada 27 Januari 1999, Indonesia memutuskan untuk lepas tangan atau memberikan kemerdekaan kepada Timor Timur jika rakyat Timor Timur menolak opsi pertama yaitu tawaran otonomi khusus yang sangat diperluas. Pada 5 Mei 1999, Indonesia dan Portugal menandatangani kesepakatan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat Timor Timur untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri atau jajak pendapat yang akan diselenggarakan oleh PBB. Jajak pendapat kemudian dilaksanakan pada 30 Agustus 1999. Hasilnya, sejumlah 344.580 suara (78,5%) memilih merdeka, dan sejumlah 94.388 suara (21,5%) memilih otonomi. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Leste memproklamasikan kemerdekaannya setelah hampir 24 tahun berada dibawah kekuasaan Indonesia.